

Determinan Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Aceh Periode 2017-2021

Dea Prassetianwar¹, Muhammad Arif²

¹Universitas Muhammadiyah Surakarta

Jl. A. Yani, Mendungan, Pabelan, Kartasura, Sukoharjo 57169, (0271) 717417

²Universitas Muhammadiyah Surakarta

Jl. A. Yani, Mendungan, Pabelan, Kartasura, Sukoharjo 57169, (0271) 717417, e-mail: arif@ums.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received 30 November 2023

Received in revised form 4 Desember 2023

Accepted 8 Desember 2023

Available online 11 Desember 2023

ABSTRACT

This study aimed to estimate the effect of the Human Development Index, Education Level, Provincial Minimum Wage, Open Unemployment Rate, and Expenditure per Capita on Poverty Level in Aceh Province 2017-2021 period. The data used is secondary data obtained from the Aceh Central Statistics Agency (BPS). This study uses a quantitative approach with panel data regression analysis method. The results showed that the best model chosen was the Random Effect Model (REM). The effect validity test (t test) explains that the human development index, provincial minimum wage, and per capita expenditure have a negative and significant effect on the poverty level in Aceh Province 2017-2021 period.

Keywords: *Poverty Level, Human Development Index, Education Level, Provincial Minimum Wage, Open Unemployment Rate, Expenditure per Capita*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pendidikan, Upah Minimum Provinsi, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Pengeluaran per Kapita terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Aceh periode 2017-2021. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model terbaik yang terpilih adalah *Random Effect Model* (REM). Hasil uji validitas pengaruh (uji t) menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia, Upah Minimum Provinsi, dan Pengeluaran per Kapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Aceh periode 2017-2021.

Kata Kunci: Tingkat Kemiskinan, Indeks Pembangunan, Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pendidikan, Upah Minimum Provinsi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Pengeluaran per Kapita

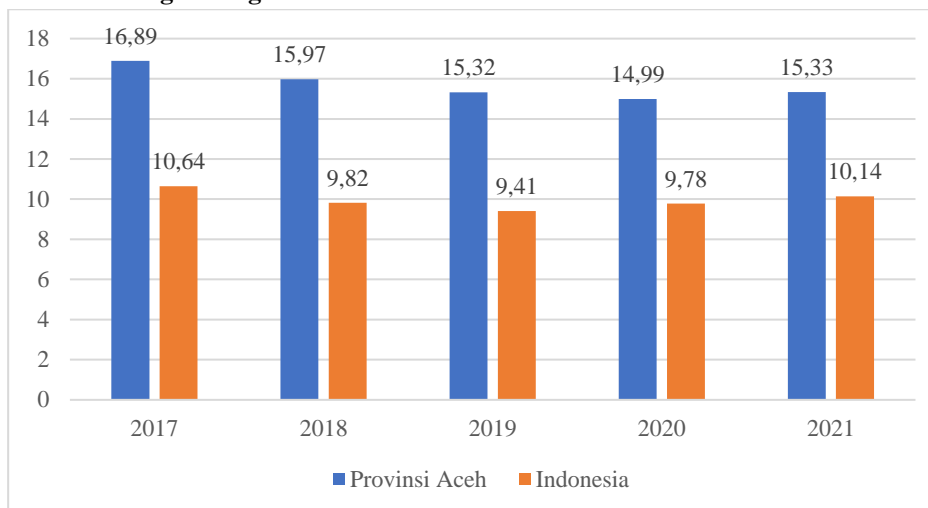
1. PENDAHULUAN

Kemakmuran masyarakat merupakan salah satu tujuan pembangunan nasional. Apabila suatu masyarakat mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan menjaga kemandiriannya, maka masyarakat tersebut dapat dikatakan sejahtera. Kegagalan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar setiap individu merupakan tantangan yang dihadapi banyak negara terkait dengan kesejahteraan masyarakatnya. Sebab, angka kemiskinan yang masih sangat tinggi membuat mereka semakin sulit memenuhi kebutuhan dasarnya (Risalah & Hapsery, 2023).

Seseorang yang miskin merasakan sensasi kekurangan, bukan karena ia memilih menjadi miskin, melainkan karena ia tidak mampu mencegahnya dengan tingkat kemampuannya saat ini. Kondisi alam dan ekonomi, kondisi struktural dan sosial, serta kondisi budaya semuanya dapat berkontribusi terhadap kemiskinan itu sendiri. Kurangnya sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya lainnya mengakibatkan berkurangnya kesempatan produksi dan ketidakmampuan memberikan kontribusi terhadap pembangunan, yang menyebabkan kemiskinan (Anwar, 2023). Kemiskinan di Aceh bisa saja akibat dari struktur sosial masyarakat Aceh sendirilah yang menjadi sumber kemiskinan, atau karena budaya individu masyarakat Aceh yang belum siap menerima perubahan. Grafik 1 memperlihatkan perbandingan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Aceh dan Indonesia selama periode 2017-2021.

Grafik 1 menunjukkan perkembangan Tingkat Kemiskinan Provinsi Aceh pada tahun 2017-2021 cenderung mengalami fluktuasi, di mana persentase penduduk miskin pada tahun 2021 mengalami lonjakan yang cukup tinggi dibanding dengan tahun 2020 dari 14,99% menjadi 15,33% karena adanya pandemi *Covid-19* yang berdampak pada perekonomian Provinsi Aceh melemah, sehingga banyak pekerja/karyawan kehilangan sumber mata pencaharian dan penghasilannya. Pola yang sama juga terjadi di tingkat nasional yaitu terjadi penurunan dari tahun 2017 sampai 2019, selanjutnya melonjak drastis di tahun 2020 dari 9,78% menjadi 10,14% di tahun 2021. Ironisnya, meskipun kemiskinan merupakan suatu kondisi yang tidak lagi bisa disembunyikan, pengetahuan mengenai kemiskinan dan kurangnya upaya untuk memberantasnya kurang menjadi perhatian penuh baik dari pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah.

Grafik 1. Perbandingan Tingkat Kemiskinan Provinsi Aceh dan Indonesia tahun 2017-2021 (%)



Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah).

Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2017 – 2022, Kota Banda Aceh mempunyai tujuh misi pembangunan dengan visi “Terwujudnya Kota Banda Aceh yang Gemilang dalam Bingkai Syariah”. “Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi, Pariwisata, dan Kesejahteraan Masyarakat” adalah salah satunya. Meskipun misi pengentasan kemiskinan diurutan ketiga, enam misi lainnya juga mendukung rencana tersebut. Peningkatan pemberdayaan perempuan dan anak, perluasan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, serta pembangunan infrastruktur yang memadai bagi seluruh kelompok masyarakat semuanya berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan di Kota Banda Aceh. Selain itu, Kota Banda Aceh gencar melaksanakan sejumlah program Syariah Islam yang bertujuan membentengi sikap dan menggalakkan penggalangan zakat bagi masyarakat kurang mampu (Bappeda, 2020).

Penyebab utama kemiskinan adalah sebagai berikut: (1) kurangnya kepemilikan, khususnya tanah dan modal; (2) terbatasnya akses terhadap sarana, prasarana, dan kebutuhan dasar; (3) kebijakan pembangunan yang bias terhadap kawasan perkotaan dan sektor perekonomian tertentu; (4) kesenjangan kesempatan antar anggota masyarakat dan sistem yang kurang mendukung; (5) perbedaan sumber daya manusia dan perekonomian tradisional dan modern; (6) rendahnya tingkat produktivitas dan pembentukan modal di masyarakat; (7) kehidupan budaya yang berkaitan dengan kemampuan individu dalam mengelola lingkungan dan sumber daya alam; (8) belum adanya tata pemerintahan yang bersih dan baik (*good governance*); (9) pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan dan tidak sadar lingkungan (World Bank, 2007).

Di Provinsi Aceh, kemiskinan merupakan permasalahan yang sudah banyak diketahui dan berlangsung dalam jangka waktu yang sangat lama. Aceh memiliki persentase masyarakat miskin dan rentan yang sangat tinggi selama lebih dari 32 tahun. Oleh karena itu, guncangan sekecil apa pun dapat mengganggu stabilitas perekonomian dan menyebabkan peningkatan tajam angka kemiskinan. Dua kategori rentan di Aceh diidentifikasi oleh (LPKM Unsyi'ah & Bappeda Aceh, 2015), sebagai kelompok yang 'miskin secara struktural' dan 'terguncang' oleh tsunami, yang menyebabkan hilangnya harta benda pribadi. Kelompok-kelompok ini tumpang tindih tetapi berbeda satu sama lain. Sebagai perbandingan, kelompok "terguncang" kurang produktif dibandingkan kelompok "miskin struktural" dalam hal budaya kerja, pendidikan, dan tingkat keterampilan. Kelompok ini lebih mandiri secara ekonomi dibandingkan kelompok miskin secara struktural karena potensi yang mereka miliki telah hancur. Jika kelompok yang terguncang mendapatkan akses terhadap sumber daya keuangan, peluang mereka untuk keluar dari garis kemiskinan lebih tinggi dibandingkan kelompok yang secara struktural miskin. Oleh karena itu, untuk mengentaskan kemiskinan, penting untuk mempertimbangkan beberapa pendekatan dan bentuk investasi publik yang memberikan hasil terbaik.

Produktivitas meningkat seiring dengan peningkatan tingkat sumber daya manusia, yang pada akhirnya berdampak pada seberapa efisien output dihasilkan. Sebaliknya, tingkat sumber daya manusia yang rendah mengakibatkan penciptaan output menjadi kurang efisien. Bukti dari era kontemporer menunjukkan bahwa negara-negara yang mengadopsi paradigma dimensi manusia telah berhasil membangun negaranya meski kekurangan sumber daya alam yang melimpah (Ali & Bintoro, 2023). Pengeluaran per Kapita dapat menjadi salah satu indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat juga (Sukirno, 2010). Negara yang memiliki Pengeluaran per Kapita yang tinggi dan memiliki jumlah penduduk yang banyak cenderung memiliki tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi juga.

Pendidikan merupakan salah satu cara untuk mengurangi kemiskinan. Dengan demikian, setiap orang yang mendapat pendidikan yang baik juga harus mempunyai pengetahuan dan kemampuan yang baik. Dengan demikian, pendidikan mempunyai kekuatan untuk memutus siklus kemiskinan dan selanjutnya menumbuhkan kesejahteraan masyarakat (Adhitya et al., 2022). Teori upah efisiensi menunjukkan bahwa upah yang lebih tinggi dikaitkan dengan profitabilitas yang lebih besar. Gaji mempengaruhi gizi dan sering diterapkan di negara-negara berkembang. Pekerja yang lebih sehat akan lebih untung, dan aktivis yang menawarkan upah layak akan mendapatkan gizi yang lebih baik. Menurut teori efisiensi upah, produktivitas pekerja meningkat seiring dengan kenaikan upah sehingga kemiskinan menurun (Hanifah & Hanifa, 2021).

Salah satu dampak negatif dari pengangguran adalah menurunkan pendapatan penduduk sehingga menurunkan pencapaian kesejahteraan seseorang. Karena tidak menerima tunjangan, kesejahteraan penduduk yang diakibatkan oleh pengangguran hanya akan memperbesar kemungkinan mereka mengalami kemiskinan (Sukirno, 2010).

Penelitian yang dilakukan oleh (Wulandari & Aisyah, 2021) menemukan bahwa tingkat pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, dan Indeks Pembangunan Manusia tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa dan Bali. (Pramessti & Utomo, 2023) menyimpulkan bahwa Upah Minimum mempunyai pengaruh terhadap Kemiskinan di Sumatera Utara periode waktu 2015-2020. (Abdillah & Faridatussalam, 2023) menemukan bahwa secara tidak langsung, naiknya kualitas kesehatan mampu mendorong naiknya kesempatan kerja dan terbukti menurunkan jumlah penduduk miskin di seluruh Provinsi di Indonesia tahun 2016-2020. (Fatmawati & Aisyah, 2023) menemukan bahwa variabel Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. (Zulna & Setyowati, 2023) hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur terbukti tidak berhubungan dengan jumlah penduduk, akan tetapi secara signifikan berkorelasi dengan pendapatan domestik regional bruto dan Indeks Pembangunan Manusia.

Setiap tahun, pemerintah Aceh berupaya mengentaskan kemiskinan dengan mengalokasikan dana untuk pembangunan, yang memungkinkan penurunan persentase dan jumlah absolut penduduk yang hidup dalam kemiskinan. Namun terkadang pemerintah menemui masalah dengan sumber yang bersifat struktural, kultural, dan alami. Oleh karena itu, melalui bentuk penelitian ini diperlukan suatu terobosan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kemiskinan di Provinsi Aceh selama periode 2017-2021, sehingga bisa diambil suatu kebijakan sebagai referensi dalam pengambilan keputusan, baik bagi pemerintah maupun penelitian selanjutnya.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan

2.1.1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia menggambarkan bagaimana penduduk setempat dapat memanfaatkan hasil pembangunan untuk mendapatkan uang, kesehatan, pendidikan, dan manfaat lainnya (BPS, 2022). Pembangunan manusia akan mampu menyediakan angkatan kerja yang dapat mengadopsi teknologi modern, meningkatkan kemampuannya dalam menciptakan lapangan kerja, dan menurunkan kemiskinan. Sumber daya yang ada di masyarakat akan lebih berkualitas bila penduduknya terdidik dan berada dalam kondisi kesehatan yang baik. Masyarakat di suatu negara atau wilayah akan lebih sukses jika sumber daya manusianya mempunyai kualitas yang lebih tinggi. Indikator kualitas sumber daya manusia yang tinggi akan menyebabkan tingginya produktivitas pekerja. Produksi yang tinggi berarti pendapatan yang lebih banyak. Masyarakat akan lebih mudah memenuhi kebutuhannya ketika pendapatan meningkat, sehingga kemiskinan akan berkurang (Hasibuan, 2023).

Penelitian yang dilakukan (Utami et al., 2022) menemukan bahwa IPM berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. Sedangkan, (Rahmawati & Anwar, 2022) melakukan penelitian di Provinsi Aceh tahun 2006-2020 menemukan bahwa Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh secara positif terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Aceh. (Andhykha et al., 2018) melakukan penelitian di Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2015 menyimpulkan bahwa IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan.

2.1.2. Tingkat Pendidikan

Jenis pekerjaan dan upah yang diterima seseorang seringkali ditentukan oleh tingkat kompetensinya. Dalam hal ini, tingkat kompetensi seseorang idealnya berkorelasi erat dengan jenis pekerjaan dan pendapatannya, artinya, semakin kompeten mereka, semakin baik pula prospek karir dan tingkat pendapatan mereka. Peningkatan kompetensi dapat dilakukan melalui pendidikan formal maupun informal. Kemampuan seseorang meningkat dengan pendidikan lebih lanjut, dengan begitu persoalan pengentasan kemiskinan dapat berhasil diselesaikan melalui pendidikan (Sinaga et al., 2023). Dikarenakan masyarakat terpelajar setidaknya bisa keluar dari kemiskinan, maka pendidikan merupakan kebutuhan paling mendasar bagi setiap orang (Netri et al., 2023). Pendidikan memainkan peran penting dalam pengentasan kemiskinan, yang menunjukkan pentingnya pendidikan selain meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan (Salsabil & Riani, 2023).

(Efendi et al., 2019) menemukan bahwa pendidikan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan Indonesia periode 2004-2017. (Giovanni, 2018) melakukan penelitian di Pulau Jawa tahun 2009-2016 juga menemukan bahwa pendidikan tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DIY pada tahun 2009-2016.

2.1.3. Upah Minimum Provinsi

Upah minimum yang terdiri dari upah pokok ditambah tunjangan tetap merupakan kompensasi bulanan terendah berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Per-01/Men/1999. Tunjangan tetap didefinisikan sebagai jumlah yang tidak merata yang diterima karyawan secara rutin tanpa memperhatikan kehadiran atau tunjangan tertentu. Kebijakan upah minimum yang ditetapkan pemerintah dimaksudkan sebagai jaring pengaman bagi buruh, mencegah mereka dari pelecehan di tempat kerja dan memastikan bahwa mereka dibayar cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka (Radityana et al., 2023). Peraturan upah minimum dianggap penting dalam upaya memerangi kemiskinan, khususnya dalam melindungi kesejahteraan pekerja dan mengurangi penyalahgunaan tenaga kerja yang diprakarsai oleh pemberi kerja. Upah minimum melindungi hak pekerja atas upah yang adil dan memadai dari perusahaan yang mungkin mengeksploitasinya dengan membayar gaji yang sangat rendah. Selain meningkatkan output dan kualitas lapangan kerja, upah minimum yang adil juga dapat mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi serta meningkatkan akses masyarakat terhadap standar hidup yang lebih adil dan lebih baik (Desmawan et al., 2023).

(Ihsan & Ikhsan, 2018) meneliti tentang analisis pengaruh UMP terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh tahun 2008-2015 menggunakan metode regresi linier berganda, data panel. Hasil penelitian menemukan bahwa Upah Minimum Provinsi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. (A. Ali et al., 2022) melakukan penelitian di Provinsi Sulawesi tahun 2010-2018 menemukan bahwa Upah Minimum Provinsi berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.

2.1.4. Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran merupakan pemborosan sumber daya keuangan karena mengakibatkan hilangnya produktivitas dan penderitaan bagi mereka yang menganggur. Mereka yang menganggur akan menghadapi berbagai masalah sosial dan ekonomi. Seseorang yang menganggur tidak mempunyai pendapatan sehingga menyebabkan semakin

turunnya tingkat kesejahteraan yang telah dicapai. Tentu saja, kemungkinan terjadinya kemiskinan akan semakin besar jika pengangguran menyebabkan kesejahteraan masyarakat terus menurun (Arifuddin et al., 2023). Seseorang yang menganggur kehilangan sumber pendapatannya. Keadaan pengangguran menempatkan para penganggur dalam skenario yang menantang dan berbahaya. Karena kurangnya pendapatan menurunkan daya beli, para pengangguran pada akhirnya menjadi miskin karena tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya. Orang yang tidak mempunyai pekerjaan juga akan membebani orang lain. Keluarga atau masyarakat akan menanggung biaya hidup sehingga meningkatkan kemungkinan menurunnya kesejahteraan orang lain. Penjelasan ini menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif antara pengangguran dan kemiskinan (Sabiq & Apsari, 2021).

(Zuhdiyaty & Kaluge, 2018) melakukan penelitian di Indonesia selama lima tahun terakhir (studi kasus 33 Provinsi) menemukan bahwa TPT tidak memiliki pengaruh terhadap kemiskinan. (Saragih et al., 2022) menemukan hal yang berbeda dari dua penelitian sebelumnya, bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia tahun 2007-2021. (Leonita & Sari, 2019) juga menemukan bahwa TPT berpengaruh terhadap kemiskinan di Indonesia tahun 2011-2017.

2.1.5. Pengeluaran per Kapita

Rata-rata pendapatan masyarakat yang tinggal di suatu wilayah tercermin dalam pendapatan per kapita. Semakin banyak barang dan jasa yang diproduksi maka pendapatan per kapita akan meningkat. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat berkorelasi langsung dengan meningkatnya pendapatan per kapita (Siregar & Ritonga, 2018). Kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan mendasar sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapatannya. Ada kebutuhan dasar manusia yang bersifat pangan dan non-makanan. Pendapatan memiliki dampak yang besar dan menguntungkan terhadap jumlah makanan dan non-makanan yang dikonsumsi dalam rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan pokok sangat bergantung pada pendapatan. Daya beli masyarakat akan meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan pokoknya. Kemiskinan akan berkurang dan kesejahteraan akan meningkat jika kebutuhan mendasar terpenuhi. Hal ini menunjukkan korelasi negatif antara kemiskinan dan pendapatan per kapita (Yudanto et al., 2020).

(Meimela, 2019) melakukan penelitian di Indonesia tahun 2015-2017 menemukan bahwa Pengeluaran per Kapita memiliki pengaruh negatif dan signifikan berdampak pada kemiskinan. Sedangkan penelitian yang dilakukan (Ayu & Faisal, 2021) di Kota Makassar periode 2008-2018 menemukan Pengeluaran per Kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kota Makassar. Hasil lain ditemukan oleh penelitian (Millenia & Zaini, 2021) yang dilakukan di Indonesia tahun 2010-2019 bahwa Pengeluaran per Kapita tidak signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data sekunder dalam bentuk data panel yang merupakan gabungan dari data *time series* dan *cross section* yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh. Data *time series* dalam penelitian ini menggunakan data periode 2017-2021. Data *cross section* meliputi 18 kabupaten, dan 5 kota di Provinsi Aceh. Data yang diteliti meliputi Tingkat Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pendidikan, Upah Minimum Provinsi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Pengeluaran per Kapita.

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis data panel dengan model ekonometrik sebagai berikut:

$$POV_{it} = \beta_0 + \beta_1 IPM_{it} + \beta_2 EDUC_{it} + \beta_3 LogUMP_{it} + \beta_4 TPT_{it} + \beta_5 LogPP_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

<i>POV</i>	= Tingkat Kemiskinan (persen)
<i>IPM</i>	= Indeks Pembangunan Manusia (angka indeks)
<i>EDUC</i>	= Tingkat Pendidikan (tahun)
<i>UMP</i>	= Upah Minimum Provinsi (juta rupiah)
<i>TPT</i>	= Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)
<i>PP</i>	= Pengeluaran per Kapita (ribu rupiah)
ε	= <i>Error term</i> (faktor kesalahan)
β_0	= Konstanta
β_1, \dots, β_5	= Koefisien Regresi Variabel Independen

i	= <i>Cross Section</i> (18 Kabupaten, 5 Kota di Provinsi Aceh)
t	= <i>Time Series</i> (Periode 2017-2021)
\log	= Operator logaritma berbasis e

Ada tiga teknik pendekatan dalam menggunakan data panel yaitu *Common Effects Model* (CEM), *Fixed Effects Model* (FEM) dan *Random Effects Model* (REM). Dalam memilih model dari ketiga analisis tersebut maka diperlukan beberapa teknik pengujian yaitu uji Chow dan uji Hausman.

3.1. Definisi Operasional Variabel

- Tingkat Kemiskinan**
Tingkat Kemiskinan adalah persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Satuan data Tingkat Kemiskinan adalah persen.
- Indeks Pembangunan Manusia**
Indeks Pembangunan Manusia adalah indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup masyarakat. Satuan data Indeks Pembangunan Manusia adalah angka indeks.
- Tingkat Pendidikan**
Tingkat Pendidikan adalah jumlah tahun belajar penduduk umur ≥ 15 tahun yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Satuan data Tingkat Pendidikan adalah tahun.
- Upah Minimum Provinsi**
Upah Minimum Provinsi adalah imbalan yang diterima oleh pekerja dalam bentuk uang atau barang selama satu bulan yang dibayarkan oleh perusahaan. Satuan data Upah Minimum Provinsi adalah juta rupiah,
- Tingkat Pengangguran Terbuka**
Tingkat Pengangguran Terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Satuan data Tingkat Pengangguran Terbuka adalah persen.
- Pengeluaran per Kapita**
Pengeluaran per Kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi selama sebulan oleh semua anggota rumah tangga dibagi dengan jumlah anggota rumah tangga menghasilkan Pengeluaran per Kapita rata-rata. Satuan data Pengeluaran per Kapita adalah ribu rupiah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Estimasi pada model regresi data panel dilakukan dengan tiga pendekatan, yaitu Common Effects Model (CEM), Fixed Effects Model (FEM), dan Random Effects Model (REM). Hasil estimasi model data panel ditampilkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Estimasi Model Ekonometrik

Variabel	Koefisien Regresi					
	CEM	Prob	FEM	Prob	REM	Prob
C	72,3248	0,1027	113,2447	0,0000	111,7828	0,0000
IPM	0,0023	0,9922	-0,4803	0,0105	-0,3948	0,0054
$EDUC$	-1,7438	0,0031	0,1405	0,7294	-0,0277	0,9430
$LOG(UMP)$	-2,4316	0,3351	-2,7306	0,0124	-2,9977	0,0001
TPT	-0,2852	0,0108	2,1581	0,9997	-0,0114	0,8166
$LOG(PP)$	-0,2619	0,9410	-2,6164	0,0032	-2,5007	0,0044
R-squared	0,4777		0,9908		0,7362	
F-statistic	19,76341		345,0434		60,27887	
Prob (F-statistic)	0,0000		0,0000		0,0000	

Sumber: Data sekunder yang diolah.

Tabel 2. Pemilihan Model Terbaik

Redundant Fixed Effects Tests (Chow test)			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	219,264603	(22,86)	0,0000
Cross-section Chi-square	461,089590	22	0,0000
Correlated Random Effects - Hausman Test			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	5,351519	5	0,3745

Sumber: Data sekunder yang diolah.

Setelah hasil regresi CEM, FEM, dan REM diperoleh, perlu dilakukan dua pengujian untuk menentukan model estimasi data panel terbaik. Pertama, dilakukan Uji Chow untuk menentukan model terbaik antara CEM dan FEM. Kedua, dilakukan Uji Hausman untuk menentukan mana yang lebih baik antara REM dan FEM. Setelah hasil regresi CEM, FEM, dan REM diperoleh, perlu dilakukan dua pengujian untuk menentukan model estimasi data panel terbaik. Pertama, dilakukan Uji Chow untuk menentukan model terbaik antara CEM dan FEM. Kedua, dilakukan Uji Hausman untuk menentukan mana yang lebih baik antara REM dan FEM.

Uji Chow dilakukan untuk menentukan model terbaik untuk mengestimasi data panel antara FEM atau CEM. Hipotesis Uji Chow sebagai berikut, apabila nilai probabilitas *cross section F* > α , maka H_0 tidak ditolak, yang artinya H_0 : Model terpilih *Common Effect Model* (CEM) untuk mengestimasi data panel. Sementara itu, apabila nilai probabilitas *cross section F* < α , maka H_0 ditolak, yang artinya H_A : model terpilih *Fixed Effect Model* (FEM). Berdasarkan tabel 3, probabilitas *cross section F* sebesar 0,0000 (< 0,10), maka H_0 ditolak, dan model yang terpilih adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

Uji Hausman dilakukan untuk menentukan model terbaik antara REM dan FEM dalam mengestimasi data panel. Hipotesis Uji Hausman sebagai berikut, apabila probabilitas $\chi^2 > 0,10$; maka H_0 tidak ditolak, yang artinya H_0 : model terpilih *Random Effect Model* (REM) dalam mengestimasi data panel. Tetapi, apabila probabilitas $\chi^2 < 0,10$, maka H_0 ditolak, artinya H_A : model terpilih *Fixed Effect Model* (FEM) yang akan digunakan dalam mengestimasi data panel. Berdasarkan tabel 3, probabilitas χ^2 sebesar 0,3745 (> 0,10), maka H_0 tidak ditolak, dan model yang terpilih adalah *Random Effect Model* (REM). *Random Effect Model* (REM) menjadi model terpilih yang akan digunakan dalam mengestimasi pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pendidikan, Upah Minimum Provinsi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Pengeluaran per Kapita terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Aceh periode 2017-2021. Berikut hasil analisis regresi model terpilih *Random Effect Model* (REM).

Tabel 3. Hasil Estimasi Model Ekonometrik Random Effects Model (REM)

$POV_{it} = 117,7828 - 0,3948 IPM_{it} - 0,0277 EDUC_{it} - 2,9977 LogUMP_{it}$		
	(0,0054)*	(0,9430)
		(0,0001)*
$-0,0114 LogTPT_{it} + 2,5007 LogPP_{it}$		
	(0,8166)	(0,0044)*
$R^2 = 0,7362; F\text{-stat} = 60,27887; Prob. F\text{-stat} = 0,0000$		

Sumber: Keterangan: *Signifikan pada $\alpha = 0,01$; **Signifikan pada $\alpha = 0,05$; ***Signifikan pada $\alpha = 0,10$; Angka dalam kurung adalah probabilitas empiric (p value) t-statistik.

3.2. Koefisien Determinasi

Pada tabel 3 terlihat nilai $R^2 = 0,7362$ berarti bahwa 73,62% variasi dari Tingkat Kemiskinan yang mampu dijelaskan oleh variasi variabel independen yaitu Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pendidikan, Upah Minimum Provinsi, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Pengeluaran per Kapita, sedangkan sisanya 26,38% dijelaskan variasi variabel lain di luar model yang diteliti.

3.3. Uji Eksistensi Model (Uji F)

Uji F digunakan untuk menguji eksistensi suatu model. Pada tabel 3 terlihat nilai probabilitas $F\text{-stat} = 0,0000$ (<

0,10), sehingga H_0 ditolak, maka model yang dipakai eksis. Variabel Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pendidikan, Upah Minimum Provinsi, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Pengeluaran per Kapita secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Aceh 2017-2021.

3.4. Uji Validitas Pengaruh (Uji t)

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh nyata terhadap variabel dependen secara individu atau parsial. Dengan membandingkan probabilitas t -statistik dengan α , dapat diketahui apakah masing-masing variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. H_0 pada uji t menyatakan bahwa variabel independen ke- i tidak memiliki pengaruh nyata terhadap variabel dependen. Hasil uji t REM terangkum pada Tabel 4.

Tabel 4. Hasil Uji Validitas Pengaruh Variabel Independen

Variabel	Koefisien	Prob.	Kesimpulan
<i>IPM</i>	-0,3948	0,0054	Signifikan pada $\alpha = 0,01$
<i>EDUC</i>	-0,0277	0,9430	Tidak signifikan
<i>LOG(UMP)</i>	-2,9977	0,0001	Signifikan pada $\alpha = 0,01$
<i>TPT</i>	-0,0114	0,8166	Tidak signifikan
<i>LOG(PP)</i>	-2,5007	0,0044	Signifikan pada $\alpha = 0,01$

Sumber: Data sekunder yang diolah

Tabel 4 menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia, Upah Minimum Provinsi, dan Pengeluaran per Kapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan. Sementara Tingkat Pendidikan dan Tingkat Pengangguran Terbuka tidak berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan. Berdasarkan hasil penghitungan konstanta setiap wilayah, diperoleh nilai konstanta tertinggi berada pada Kabupaten Pidie Jaya sebesar 5,917,397. Sedangkan nilai konstanta terendah berada pada Kabupaten Aceh Selatan sebesar -3,565,044. Hal tersebut berarti terkait pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pendidikan, Upah Minimum Provinsi, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Pengeluaran per Kapita terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Aceh periode 2017-2021.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan hasil regresi menunjukkan bahwa variabel Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Aceh periode 2017-2021 dengan koefisien regresi sebesar -0,3948 dan probabilitas sebesar 0,0054. Pola hubungan antara indeks pembangunan dengan Tingkat Kemiskinan adalah linier-linier (lin-lin), sehingga jika Indeks Pembangunan Manusia naik 1 angka indeksinya maka Tingkat Kemiskinan akan turun sebesar -0,3948 persen. Sebaliknya, jika indeks pembangunan turun 1 angka indeksinya, maka Tingkat Kemiskinan akan naik sebesar -0,3948 persen, sehingga penelitian ini sesuai dengan hipotesis penelitian. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Andhykha et al., 2018), di mana IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2015. Naiknya IPM akan berdampak pada kualitas sumber daya manusia meningkat. Hal tersebut di implementasikan dengan kemampuan masyarakat yang baik dalam mengakses dan mengelola di bidang kesehatan, infrastruktur, dan sarana dan prasana umum lainnya.

4.2 Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Tingkat Kemiskinan

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Giovanni, 2018), bahwa pendidikan negatif dan tidak signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Pulau Jawa tahun 2009-2016. Sebab, pemberdayaan manusia yang belum efektif, dibuktikan dengan masih banyaknya lulusan pelajar di Provinsi Aceh yang masih mengandalkan pertanian sebagai sumber penghasilan. Dengan demikian, rantai kemiskinan tidak bisa diputuskan dengan lamanya Tingkat Pendidikan yang ditempuh seseorang.

4.3 Pengaruh Upah Minimum Provinsi terhadap Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan hasil regresi menunjukkan bahwa variabel Upah Minimum Provinsi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Aceh periode 2017-2021 dengan koefisien regresi sebesar -2,9977 dan probabilitas sebesar 0,0001. Pola hubungan antara Upah Minimum Provinsi dengan Tingkat Kemiskinan adalah linier-logaritma (lin-log), sehingga apabila Upah Minimum Provinsi naik 1 persen, maka

Tingkat Kemiskinan akan turun sebesar $-2,9977/100 = -0,029977$ persen. Sebaliknya, apabila Upah Minimum Provinsi turun 1 persen, maka Tingkat Kemiskinan akan naik sebesar $-2,9977/100 = -0,029977$ persen, sehingga hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis penelitian. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Ihsan & Ikhsan, 2018), bahwa Upah Minimum Provinsi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh tahun 2008-2015. Naiknya Upah Minimum Provinsi bisa memberikan penghasilan yang layak bagi para pekerja/karyawan, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup dan produktivitas pekerja meningkat pula serta Tingkat Kemiskinan berkurang.

4.4 Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Tingkat Kemiskinan

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Zuhdiyaty & Kaluge, 2018), di mana Tingkat Pengangguran Terbuka negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia tahun 2011-2015. Dikarenakan pengangguran di dominasi oleh pengangguran terdidik, semakin tinggi pendidikan yang ditempuh oleh seseorang, semakin tinggi pula keinginan untuk mencari kesempatan kerja yang sesuai dengan keahliannya. Selain itu, apabila seseorang belum mempunyai pekerjaan tetap, tetapi mampu memenuhi kebutuhannya, maka tidak dikatakan menganggur. Dengan demikian, Tingkat Pengangguran Terbuka tidak berpengaruh terhadap tingkat Kemiskinan.

4.5 Pengaruh Pengeluaran per Kapita terhadap Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan hasil regresi menunjukkan bahwa variabel pendapatan per kapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Aceh periode 2017-2021 dengan koefisien regresi sebesar $-2,5007$ dan probabilitas sebesar $0,0044$. Pola hubungan antara Pengeluaran per Kapita dengan Tingkat Kemiskinan adalah linier-logaritma (lin-log), sehingga apabila Pengeluaran per Kapita mengalami kenaikan sebesar 1 persen, maka Tingkat Kemiskinan akan turun sebesar $-2,5007$ persen. Sebaliknya, apabila Pengeluaran per Kapita mengalami penurunan sebesar 1 persen, maka Tingkat Kemiskinan akan naik sebesar $-2,5007$ persen, sehingga hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis penelitian. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Meimela, 2019), bahwa Pengeluaran per Kapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia tahun 2015-2017. Tingkat kesejahteraan meningkat terjadi karena kenaikan pendapatan riil akan mendorong meningkatnya Pengeluaran per Kapita rumah tangga, sehingga dapat mengurangi Tingkat Kemiskinan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan uji Chow dan uji Hausman, model yang terpilih adalah Random Effect Model (REM) yang menunjukkan hasil uji validitas pengaruh (uji t) Indeks Pembangunan Manusia, Upah Minimum Provinsi, dan Pengeluaran per Kapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Aceh tahun 2017-2021. Hal ini dapat dilihat bahwa program mengentaskan kemiskinan yang dilakukan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah masih belum optimal, karena aksesibilitas pendidikan yang belum merata, infrastruktur, sarana, dan prasarana yang minim serta kesenjangan sosial lainnya. Selain itu, penetapan upah minimum untuk pekerja yang belum terpenuhi sesuai standar yang layak juga berdampak pada produktivitas pekerja yang kurang maksimal. Dengan demikian, daya beli masyarakat juga akan menurun akibat pendapatannya yang sedikit sehingga kemiskinan di Provinsi Aceh meningkat. Untuk uji eksistensi model atau uji F menunjukkan bahwa model yang dipakai eksis. $R^2 = 0,7362$, artinya 73,62% variasi dari Tingkat Kemiskinan yang mampu dijelaskan oleh variasi variabel independen yaitu Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pendidikan, Upah Minimum Provinsi, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Pengeluaran per Kapita, sedangkan sisanya 26,38% dijelaskan variasi variabel lain di luar model yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdillah, L., & Faridatussalam, S. R. (2023). Analisis Tingkat Kemiskinan di Indonesia Periode 2016-2020. *Cakrawala Repositori IMWI*, 6(3), 485-493.
- [2] Adhitya, B., Prabawa, A., & Kencana, H. (2022). Analisis Pengaruh Pendidikan, Kesehatan, Sanitasi dan Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga per Rumah Tangga terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6(1), 288-295.
- [3] Ali, A., Timun, L., & Murfain, L. O. (2022). Analisis Pengaruh Pengangguran Terbuka, Upah Minimum Provinsi, Nilai Tukar Petani, Daya Beli dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan Provinsi di Sulawesi. *Aksara Kawanua: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(2), 93-109.
- [4] Ali, G. N., & Bintoro, N. S. (2023). Analisis Pengaruh Tenaga Kerja Dan Modal Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dalam Pengentasan Kemiskinan. *Journal of Development Economic and Social Studies*, 2(1).
- [5] Andhykha, R., Handayani, H. R., & Woyanti, N. (2018). Analisis Pengaruh PDRB, Tingkat Pengangguran, dan IPM Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. *Media Ekonomi Dan Manajemen*, 33(2), 113-123.
- [6] Anwar, A. A. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Jawa Tengah Periode 2002-2021

- Analisis Data Time Series. *Jurnal Kendali Akuntansi*, 1(2), 194-206.
- [7] Arifuddin, A. A., Muta'al, R., & Amir, H. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Masyarakat Di Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan. *Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology*, 1(1), 17-24.
- [8] Ayu, E. N. N., & Faisal, A. A. (2021). Mengukur Dampak Pengangguran, Tingkat Pendidikan, Upah Minimum, dan Pengeluaran per Kapita Terhadap Kemiskinan di Kota Makassar. *Bulletin of Economic Studies*, 1(1), 1–12.
- [9] Bappeda, B. A. (2020). *Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kota Banda Aceh 2019*. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- [10] BPS, A. (2022). *Indeks Pembangunan Manusia*. Badan Pusat Statistik (Bps.Go.Id).
- [11] Desmawan, D., Salsabila, A. K., Amalia, L., Anargya, R. A., Kirana, R. S., & Valentina, V. (2023). Analisis Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Banten. *Jurnal Manajemen Akuntansi (JUMSI)*, 3(2), 1156-1164.
- [12] Efendi, R., Indartono, S., & Sukidjo, S. (2019). The Relationship of Indonesia's Poverty Rate Based on Economic Growth, Health, and Education. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 6(2), 323.
- [13] Fatmawati, Y., & Aisyah, S. (2023). Pengaruh Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pengembangan Teknologi Informasi Dan Penanaman Modal Asing Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2019-2021. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 6(2), 344-353.
- [14] Giovanni, R. (2018). Analisis Pengaruh PDRB, Pengangguran dan Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan di Pulau Jawa Tahun 2009-2016. *Economics Development Analysis Journal*, 7(1), 23–31.
- [15] Hanifah, S., & Hanifa, N. (2021). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Lamongan. *Independent: Journal of Economics*, 1(3), 191-206.
- [16] Hasibuan, L. S. (2023). Analisis pengaruh ipm, inflasi, pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran dan kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 8(1), 53-62.
- [17] Ihsan, K., & Ikhsan. (2018). Analisis Pengaruh Ump, Inflasi Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM)*, 3(3), 408–419.
- [18] Leonita, L., & Sari, R. K. (2019). *Pengaruh PBRB, Pengangguran, dan Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan di Indonesia*. 3(2), 1–8.
- [19] LPKM Unsyi'ah, U., & Bappeda Aceh, B. (2015). *Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Aceh*. Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPKM) Universitas Syiah Kuala dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Aceh.
- [20] Meimela, A. (2019). Model Pengaruh Tingkat Setengah Pengangguran, Pekerja Informal dan Pengeluaran Perkapita Disesuaikan Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2015-2017. *Jiep*, 19(1), 7–13.
- [21] Millenia, E., & Zaini, D. (2021). Pengaruh Upah Minimum , Tingkat Pengangguran Terbuka , Pendidikan Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan di. *Ecosains : Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembangunan*, 10(November), 106–114.
- [22] Risalah, M. R. N., & Hapsery, A. (2023). *Regresi Data Panel untuk Memodelkan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Jawa Timur tahun 2019-2021*. 410–425.
- [23] Netri, N. N., Kawung, G. M., & Siwu, H. F. D. (2023). Pengaruh Tingkat Pengangguran, Upah dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2009-2021. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 23(6), 97-108.
- [24] Pramesti, F. D., & Utomo, Y. P. (2023). Analisis Determinan Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Sumatra Utara Tahun 2015-2020. *Jurnal Ilmu Sosial*, 3(2), 240-250.
- [25] Radityana, I. D., Djayastra, I. K., Danendra, A. B., & Wisnu, N. (2023). Pengaruh Upah Minimum, Indeks Pembangunan Manusia dan Pengangguran Terbuka terhadap Jumlah Kemiskinan di Provinsi Bali. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Manajemen Indonesia (JKEMI)*, 1(1), 16-24.
- [26] Rahmawati, Y. K. (2022). Pengaruh Laju Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Aceh. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 12(2), 141–154.
- [27] Sabiq, M., & Apsari, N. (2021). Dampak Pengangguran Terhadap Tindakan Kriminal Ditinjau dari Perspektif Konflik. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 3(1), 51–61.
- [28] Salsabil, I., & Riani, W. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pendidikan, Kesehatan dan Pertumbuhan Penduduk terhadap Tingkat Kemiskinan. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 15(2).
- [29] Saragih, R. K., & Silalahi, P. R., & Tambunan, K. (2022). *Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia tahun 2007-2021*. 1(2), 71–79.
- [30] Sinaga, M., Damani, S. W. H., Zalukhu, R. S., Hutaeruk, R. P. S., & Collyn, D. (2023). Pengaruh

- Pendidikan, Pendapatan Per Kapita Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Kepulauan Nias. *Jurnal Ekuilnomi*, 5(1), 140-152.
- [31] Siregar, N. A., & Ritonga, Z. (2018). Analisis Tingkat Pendidikan dan Tingkat Pendapatan Terhadap Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Labuhanbatu. *Informatika: Jurnal Ilmiah AMIK Labuhan Batu*, 6(1), 1–10.
- [32] Sukirno, S. (2010). *Makro Ekonomi : Teori Pengantar*. Rajawali Pers.
- [33] Utami, F. P., Lubis, I., & Rahmanta. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan di Aceh Bagian Timur. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 6(1), 1–9.
- [34] World Bank, W. (2007). *Era Baru dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*. The World Bank Office Jakarta.
- [35] Wulandari, H., & Aisyah, S. (2021). Analisis determinan kemiskinan di Provinsi Jawa dan Bali. *Journal of Economics Research and Policy Studies*, 1(2), 106-116.
- [36] Yudanto, D., Rochaida, E., & Priyagus, P. (2020). Pengaruh pendapatan perkapita dan inflasi serta suku bunga terhadap konsumsi rumah tangga makanan dan non makanan serta pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. *KINERJA*, 17(2), 287–297.
- [37] Zuhdiyaty, N., & Kaluge, D. (2018). Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan di Indonesia Selama Lima Tahun Terakhir. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia*, 11(2), 27–31.
- [38] Zulna, A. M. D., & Setyowati, E. (2023). Analisis Jumlah Penduduk, Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), Dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Tingkat Kemiskinan. *Gema Indonesia*, 12(1).

Lampiran 1.

Tabel 5. Efek dan Konstanta Wilayah

Kabupaten/Kota	Effect	α_0
Kabupaten Simeulue	0.403735	1.117.828
Kabupaten Aceh Singkil	3.766.672	4.884.500
Kabupaten Aceh Selatan	-4.682.872	-3.565.044
Kabupaten Aceh Tenggara	-3.342.448	-2.224.620
Kabupaten Aceh Timur	-3.188.891	-2.071.063
Kabupaten Aceh Tengah	0.726976	1.117.829
Kabupaten Aceh Barat	3.158.947	4.276.775
Kabupaten Aceh Besar	-0.725024	1.117.827
Kabupaten Pidie	3.854.208	4.972.036
Kabupaten Bireuen	-1.811.700	-693.872
Kabupaten Aceh Utara	0.783941	1.117.829
Kabupaten Aceh Barat Daya	-1.425.117	-307.289
Kabupaten Gayo Lues	2.291.282	3.409.110
Kabupaten Aceh Tamiang	-3.375.436	-2.257.608
Kabupaten Nagan Raya	1.188.365	2.306.193
Kabupaten Aceh Jaya	-2.991.915	-1.874.087
Kabupaten Bener Meriah	4.595.828	5.713.656
Kabupaten Pidie Jaya	4.799.569	5.917.397
Kota Banda Aceh	-1.385.993	-268.165
Kota Sabang	2.168.377	3.286.205
Kota Langsa	-2.203.952	-1.086.124
Kota Lhokseumawe	-1.565.882	-448.054
Kota Subulussalam	-1.038.668	79.160

Sumber: Olah data penelitian